

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukuaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukuaan tersebut untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan negara pada umumnya bersalah dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan pertama (Dr. Bustamar Ayza, S.H., 2017).

Menurut Prof Dr. M. J. H. Smeets menyatakan pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah (A. H. I. R. B. A. Dara, 2018).

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya.

Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat (Pajak, 2018).

Saat ini Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia khususnya Kota Sukabumi. Untuk melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kota Sukabumi harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Goverance) dan mendukung program pemerintah pusat berbasis teknologi (E Government), saat ini pemerintah Kota Sukabumi khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah membangun suatu sistem aplikasi pelaporan dan Pembayaran secara online melalui program Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) yang terdiri dari pengelolaan Pajak Restoran, Hotel, Parkir, Reklame, dan PPJ (Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukabumi, 2018).

Table 1.1

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN
2017-2018

Tahun	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH	%
2017	16.121.555.000	11.081.403.806	68,74	5.040.151.194	31,26
2018	17.340.468.819	22.070.852.430	127,2	4.730.383.611	-27,2

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukabumi

Berdasarkan Table 1.1 Laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017-2018, pendapatan pajak daerah pada tahun 2017 sebelum adanya program aplikasi PANTAS ditargetkan mencapai Rp.16.121.555.000,-, akan tetapi, hanya terealisasi sebesar Rp.11.081.403.806,- terdapat selisih Rp.5.040.151.194,- dari anggaran yang ditargetkan pada tahun 2017. Sedangkan setelah adanya aplikasi PANTAS pada tahun 2018 realisasi anggaran pajak daerah melebihi dari target yang ditentukan.

Dengan memperhatikan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tugas akhir **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI PANTAS DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KOTA SUKABUMI”** penelitian ini di fokuskan di kantor BPKD Kota Sukabumi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini merupakan :

1. Bagaimana ketepatan sasaran program aplikasi PANTAS ?
2. Bagaimana sosialisasi tentang program aplikasi PANTAS ?
3. Bagaimana tujuan program aplikasi PANTAS ?
4. Bagaimana pemahaman program aplikasi PANTAS ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketepatan sasaran program aplikasi PANTAS di Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui sosialisasi program aplikasi PANTAS di Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui tujuan program aplikasi PANTAS di Kota Sukabumi.
4. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak tentang aplikasi PANTAS di Kota Sukabumi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan dalam bidang perhitungan dan pelaporan Pajak daerah.

- b. Untuk meningkatkan ilmu yang didapat selama masa kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi sehingga bisa di aplikasikan di masa mendatang.
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi.
 - d. Untuk menunjang kapabilitas di dunia kerja yang akan dihadapi.
2. Bagi Kantor BPKD Kota Sukabumi

Sebagai salah satu bahan evaluasi aplikasi PANTAS di BPKD Kota Sukabumi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Clean and Goverance)

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, dan dapat memberikan informasi kepada pihak lain tentang perhitungan pelaporan Pajak daerah yang sesuai dengan peraturan sebagai alat ukur atas pelaksanaan perhitungan pelaporan Pajak daerah yang selama ini mereka lakukan.

1.5 Metode Penelitian

Metode deksriptif ialah metode yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini Menurut Hidayat (2010), menyatakan bahwa :

“Penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud “luas” dalam hal ini artinya lebih condong pada analisa

yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Penyelesaian dalam metode penelitian deskriptif inilah yang menyebabkan seseorang harus mempunyai komitmen yang kuat dari teori sampai ketika terjun di lapangan”.

1.5.1 Teknik Pengumpulan data

Penulisan tugas akhir ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan laporan. Teknik tersebut merupakan Observasi atau pengamatan langsung, wawancara, dan studi pustaka, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada saat melakukan Praktek Kerja Lapangan di BPKD Kota Sukabumi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan tanya jawab dengan staff bagian pajak di kantor BPKD Kota Sukabumi

3. Studi Pustaka.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca buku yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir ini. Dengan metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis buku yang terkait dengan perpajakan seperti, Undang – undang Perpajakan serta buku lain yang bertema perpajakan.

1.6 Jadwal Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulisan melakukan penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Cikole Dalam No. 23/29 Kota Sukabumi

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis kurang lebih selama 2 bulan dari mulai 1 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021 dengan efektifitas disesuaikan dengan hari dan jam kerja instansi yang bersangkutan yakni pada hari Senin sampai dengan Jum'at dan mulai masuk pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Table 1.2

Jadwal Agenda Penelitian

No	Uraian	Maret				April				Mei				Juni				juli			
		Minggu Ke																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Praktek Kerja Lapangan																				
2.	Pengajuan Judul																				
3.	Pengumpulan Data																				
4.	Penyusunan Tugas Akhir																				
5.	Bimbingan																				

6.	Sidang Tugas Akhir																								
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

